

**DINAMIKA KONTRADIKTIF KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH YANG MENGHASILKAN POLA REKURSIF
KEMISKINAN BERKELANJUTAN**

Franky Djafar

franky.djafar@umgo.ac.id

Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Rifka S. Akibu

rifkaakibu@umgo.ac.id

Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Syahrul Ibad

sinbad.sit@gmail.com

Universitas Ibrahimy

ABSTRACT

Poverty remains a major challenge in development, particularly when policies place greater emphasis on infrastructure than on equitable welfare. This paradoxical situation creates a systemic vicious cycle of poverty, as seen in Gorontalo. Poverty patterns primarily occur in coastal and rural areas, reinforced by limited access to education and health care, which ultimately perpetuates poverty across generations. This research employed a qualitative method with a case study approach. The results show that development policies remain partial, overlapping, and lack community participation. Aid programs are predominantly consumptive, while infrastructure development is not accompanied by improvements in the quality of human resources. This actually reinforces the cycle of poverty. In conclusion, a reorientation of development policies is needed from growth-oriented to people-oriented development, with an emphasis on education, health, and community empowerment as the main strategy to break the chain of systemic poverty in a sustainable manner.

Keywords: *contradictory dynamics, government policy, regional development, recursive patterns, sustainable poverty*

ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan, khususnya ketika kebijakan lebih menitikberatkan pada aspek infrastruktur dibandingkan pada pemerataan kesejahteraan. Kondisi paradoksal ini melahirkan *vicious cycle of poverty* yang bersifat sistemik, sebagaimana terlihat di Gorontalo. Pola kemiskinan terutama muncul di wilayah pesisir dan pedesaan, diperkuat oleh keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan yang akhirnya melanggengkan kemiskinan lintas generasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan masih bersifat parsial, tumpang tindih, serta minim partisipasi masyarakat. Program bantuan lebih dominan bersifat konsumtif, sementara pembangunan infrastruktur tidak diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini justru memperkuat lingkaran kemiskinan. Kesimpulannya, diperlukan reorientasi kebijakan pembangunan dari orientasi pertumbuhan (*growth oriented*) menuju pembangunan berbasis manusia (*people oriented development*), dengan penekanan pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi utama untuk memutus rantai kemiskinan sistemik secara berkelanjutan.

Kata kunci: dinamika kontradiktif, kebijakan pemerintah, pembangunan daerah, pola rekursif, kemiskinan berkelanjutan

PENDAHULUAN

Tingkat kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan adanya dinamika kontradiktif dalam kebijakan pembangunan daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) mencatat angka kemiskinan mencapai 15,2%, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 9,4%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa arah pembangunan belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan sosial-ekonomi, termasuk di Gorontalo yang hingga kini masih menghadapi tantangan serius dalam menurunkan angka kemiskinan. Fenomena ini sejalan dengan pandangan bahwa kemiskinan di Indonesia bersifat kompleks dan multidimensional, tidak hanya terkait faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi dimensi sosial, budaya, dan kelembagaan (Barrett, Carter, & Chavas, 2019).

Kontradiksi kebijakan pembangunan tampak ketika pemerintah daerah lebih menitikberatkan pada proyek infrastruktur sebagai indikator utama pertumbuhan ekonomi. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik memang memberikan kontribusi, namun manfaatnya belum sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat miskin. Sementara itu, sektor pertanian dan perikanan—yang menjadi basis utama mata pencaharian masyarakat—belum mendapatkan perhatian yang seimbang. Akibatnya, pembangunan yang semestinya menciptakan kesejahteraan justru memunculkan pola rekursif kemiskinan berkelanjutan dan memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi.

MacKinnon et al. (2022) menekankan bahwa fokus pembangunan pada infrastruktur sering kali hanya menghasilkan pertumbuhan simbolik tanpa benar-benar menyentuh akar persoalan kesejahteraan masyarakat lokal. Pandangan ini sejalan dengan Arif, Muta'ali, & Rijanta (2025) yang menemukan bahwa jebakan kemiskinan di Indonesia bersifat spasial, di mana wilayah

dengan dominasi sektor primer cenderung terperangkap dalam ketertinggalan meskipun ada pembangunan fisik. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa paradigma pembangunan yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi ketimbang pemerataan kesejahteraan justru melanggengkan ketidakadilan sosial-ekonomi dan memperlebar jurang kemiskinan.

Rantai kemiskinan sistemik semakin diperkuat oleh program pemerintah yang tidak berkelanjutan. Banyak kebijakan pengentasan kemiskinan lebih bersifat proyek jangka pendek tanpa strategi pemberdayaan jangka panjang. Bantuan sosial misalnya, meskipun penting sebagai jaring pengaman, tidak diikuti dengan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat. Hal ini justru memunculkan ketergantungan baru dan mempertahankan pola siklus vicious, di mana masyarakat miskin tetap berada dalam lingkaran keterbatasan (Utomo, 2023; Iammarino, Rodríguez-Pose, & Storper, 2022).

MacKinnon et al. (2022) menekankan bahwa orientasi pembangunan yang terfokus pada infrastruktur sering kali hanya menghasilkan pertumbuhan simbolik tanpa benar-benar menjawab akar persoalan kesejahteraan masyarakat lokal. Pandangan ini sejalan dengan Arif, Muta'ali, & Rijanta (2025) yang menunjukkan bahwa jebakan kemiskinan di Indonesia memiliki karakter spasial; wilayah dengan dominasi sektor primer cenderung tetap terperangkap dalam ketertinggalan meskipun pembangunan fisik terus digencarkan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi ketimbang pemerataan kesejahteraan justru melanggengkan ketidakadilan sosial-ekonomi sekaligus memperlebar jurang kemiskinan.

Rantai kemiskinan sistemik semakin diperkuat oleh kebijakan pemerintah yang cenderung bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Banyak program pengentasan kemiskinan lebih menyerupai proyek temporer tanpa didukung strategi pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Bantuan sosial, misalnya, meskipun penting sebagai jaring pengaman, tidak diiringi dengan upaya peningkatan kapasitas produktif masyarakat. Situasi ini justru melahirkan ketergantungan baru dan mempertahankan pola rekursif *vicious cycle of poverty*, di mana kelompok miskin tetap terjebak dalam lingkaran keterbatasan (Utomo, 2023; Iammarino, Rodríguez-Pose, & Storper, 2022).

Melihat kondisi tersebut, jelas bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, tetapi juga oleh paradoks dalam kebijakan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi berbasis infrastruktur yang tidak diimbangi pemerataan kesejahteraan hanya akan melanggengkan siklus kemiskinan. Untuk memutus rantai ini, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan dengan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama pembangunan daerah. Sebagaimana ditegaskan Mulyadi (2016), peran pemerintah seharusnya tidak sekadar sebagai penyedia program, melainkan juga fasilitator yang mendorong pemberdayaan masyarakat agar mampu keluar dari kemiskinan.

TINJAUAN TEORITIS

Paradigma pembangunan daerah selama ini masih dominan menggunakan pendekatan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada infrastruktur. Namun, pendekatan semacam ini sering kali hanya menghasilkan pertumbuhan simbolik tanpa benar-benar menyentuh akar kesejahteraan masyarakat lokal. MacKinnon et al. (2022) menegaskan bahwa pembangunan di wilayah tertinggal cenderung gagal menjawab kebutuhan masyarakat, karena lebih menitikberatkan

pada indikator fisik ketimbang pemerataan. Pandangan ini diperkuat oleh Arif, Muta'ali, & Rijanta (2025) yang menemukan bahwa jebakan kemiskinan di Indonesia bersifat spasial, di mana wilayah dengan dominasi sektor primer tetap terperangkap dalam ketertinggalan meskipun pembangunan fisik meningkat.

Konsep *vicious cycle of poverty* menjelaskan bahwa kemiskinan bersifat sistemik dan berulang. Rendahnya pendapatan membatasi akses pendidikan dan kesehatan, yang berakibat pada kualitas sumber daya manusia rendah dan memperkuat kemiskinan lintas generasi (Barrett, Carter, & Chavas, 2019). Nurjihadi & Dharmawan (2016) menemukan bahwa masyarakat pedesaan cenderung terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan karena keterbatasan sumber daya produktif. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak dapat diatasi hanya dengan program jangka pendek, melainkan membutuhkan strategi berkelanjutan yang menyentuh dimensi sosial-ekonomi secara menyeluruh.

Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan pembangunan seharusnya dirancang secara partisipatif, kontekstual, dan terintegrasi. Namun, penelitian Rothenberg et al. (2025) menunjukkan lemahnya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, yang membuat banyak program pembangunan tidak efektif. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan, sehingga aspirasi kelompok miskin sering kali tidak terakomodasi (Mulyadi, 2016). Lemahnya tata kelola pembangunan pada akhirnya berkontribusi besar dalam mempertahankan kemiskinan struktural di tingkat lokal.

Upaya memutus rantai kemiskinan berkelanjutan membutuhkan reorientasi paradigma pembangunan menuju *people oriented development*. Utomo (2023) menegaskan bahwa peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan adalah kunci utama, sedangkan

Lubis (2017) menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat jauh lebih efektif dibandingkan bantuan konsumtif. Integrasi pembangunan manusia dengan penguatan ekonomi lokal diyakini lebih mampu menekan kemiskinan struktural dibandingkan pendekatan top-down. Dengan demikian, teori pembangunan, konsep siklus kemiskinan, dan kerangka kebijakan publik menjadi landasan penting untuk memahami sekaligus mencari solusi atas paradoks pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang dipilih untuk menggali secara mendalam dinamika kontradiktif kebijakan pembangunan di Gorontalo serta dampaknya terhadap pola rekursif kemiskinan. Pendekatan ini dipandang sesuai karena mampu menjelaskan fenomena sosial yang kompleks dalam konteks nyata dengan mempertimbangkan perspektif aktor yang terlibat. Creswell (2018) menegaskan bahwa penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna yang dikonstruksi oleh individu atau kelompok terkait masalah sosial tertentu.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta kelompok masyarakat miskin yang terdampak langsung oleh kebijakan pembangunan. Observasi dilakukan pada kegiatan perencanaan pembangunan daerah seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), sementara dokumentasi meliputi analisis dokumen resmi pemerintah, laporan pembangunan, serta data statistik.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses ini mengikuti model analisis kualitatif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, & Saldaña (1994/2014), di mana data dikelola

secara sistematis untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang relevan dengan fokus penelitian. Reduksi data dilakukan untuk memilih informasi yang penting, penyajian data disusun dalam bentuk narasi, tabel, maupun gambar, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan melalui verifikasi berulang untuk menjaga validitas.

Untuk memastikan **keabsahan data**, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Wawancara dari berbagai informan dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi, sehingga dapat diperoleh gambaran yang utuh dan valid mengenai fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Kontradiksi Pembangunan Daerah

Hasil temuan penelitian memperlihatkan bahwa orientasi pembangunan di Gorontalo cenderung menitikberatkan pada pertumbuhan berbasis infrastruktur, sementara aspek pemerataan kesejahteraan masyarakat masih terabaikan. Dominasi pembangunan fisik tersebut belum berdampak nyata pada penurunan tingkat kemiskinan yang masih mencapai 15,2% (BPS, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dijalankan lebih bersifat seremonial, sehingga tidak mampu menjangkau akar persoalan mendasar yang melanggengkan kemiskinan.

2. Dilema Kebijakan Pemerintah terhadap Rantai Kemiskinan

Kebijakan pembangunan di Gorontalo cenderung lebih fokus pada proyek fisik, sementara kemiskinan tetap bertahan terutama di wilayah pedesaan. Siklus vicious kemiskinan terbentuk ketika rendahnya pendapatan berimplikasi pada keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, yang memperkuat rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini semakin diperparah dengan tumpang tindih kebijakan pusat dan daerah, serta program sosial yang parsial dan konsumtif. Fakta ini ditegaskan dalam Gambar 1 yang

memperlihatkan perbandingan angka kemiskinan Gorontalo dengan rata-rata nasional.



Gambar 1. Perbandingan Angka Kemiskinan Nasional dan Gorontalo Tahun 2023

3. Pola Rekursif Kemiskinan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kontradiksi kebijakan pembangunan di Gorontalo tidak hanya menyebabkan program tidak berjalan efektif, tetapi juga melahirkan pola rekursif kemiskinan yang terus berulang dari generasi ke generasi. Pola ini muncul karena kebijakan yang seharusnya berfungsi sebagai sarana pemberdayaan lebih banyak diarahkan pada bantuan jangka pendek dan konsumtif. Masyarakat miskin pada akhirnya tidak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas produktif mereka, sehingga tetap terjebak dalam lingkaran keterbatasan.

Kemiskinan yang terjadi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga lahir dari lemahnya tata kelola kebijakan. Program penanggulangan yang dijalankan selama ini cenderung bersifat sementara, sehingga tidak mampu menciptakan perubahan mendasar. Alih-alih membebaskan masyarakat dari kondisi sulit, kebijakan tersebut justru memperkuat ketergantungan pada bantuan pemerintah.

Selain itu, pola rekursif kemiskinan juga diperkuat oleh perilaku konsumsi masyarakat yang lebih banyak diarahkan

pada kebutuhan sesaat. Ketika pendapatan terbatas digunakan untuk konsumsi yang tidak menambah nilai produktif, masyarakat semakin sulit keluar dari jeratan kemiskinan. Hal ini menciptakan lingkaran yang berulang, di mana rendahnya pendapatan menyebabkan konsumsi tidak produktif, dan konsumsi tidak produktif pada akhirnya memperkuat pendapatan yang rendah.

Strategi pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah masih bersifat jangka pendek. Fokus pada pembangunan fisik tanpa diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia hanya memperpanjang rantai kemiskinan. Akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas semakin menutup peluang masyarakat miskin untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Dengan demikian, meskipun pembangunan fisik terlihat nyata, kondisi sosial-ekonomi masyarakat miskin tetap stagnan.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai bagaimana pola rekursif kemiskinan terbentuk, penelitian ini merangkum faktor penyebab, mekanisme rekursif, dan dampaknya dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Pola Rekursif Kemiskinan

Faktor Penyebab	Mekanisme Rekursif	Dampak
Kebijakan parsial & konsumtif	Program bantuan jangka pendek tanpa pemberdayaan	Ketergantungan pada bantuan

Konsumsi tidak produktif	Pengeluaran untuk kebutuhan sesaat (contoh: tembakau)	Pendapatan stagnan, produktivitas rendah
Strategi pembangunan jangka pendek	Tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan	Kemiskinan berulang lintas generasi

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa pola rekursif kemiskinan terbentuk karena adanya kombinasi dari tiga faktor utama, yaitu kebijakan parsial, perilaku konsumsi tidak produktif, dan strategi pembangunan yang tidak menyentuh akar persoalan. Kebijakan parsial yang lebih bersifat konsumtif menciptakan ketergantungan, konsumsi tidak produktif memperlemah daya dorong ekonomi keluarga miskin, dan strategi pembangunan jangka pendek memperpanjang rantai kemiskinan lintas generasi.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kemiskinan di Gorontalo bersifat multidimensional. Ia tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan pendapatan, tetapi juga oleh lemahnya arah kebijakan pembangunan. Selama kebijakan yang diterapkan masih bersifat parsial dan jangka pendek, lingkaran kemiskinan berulang akan tetap bertahan dan sulit diputus.

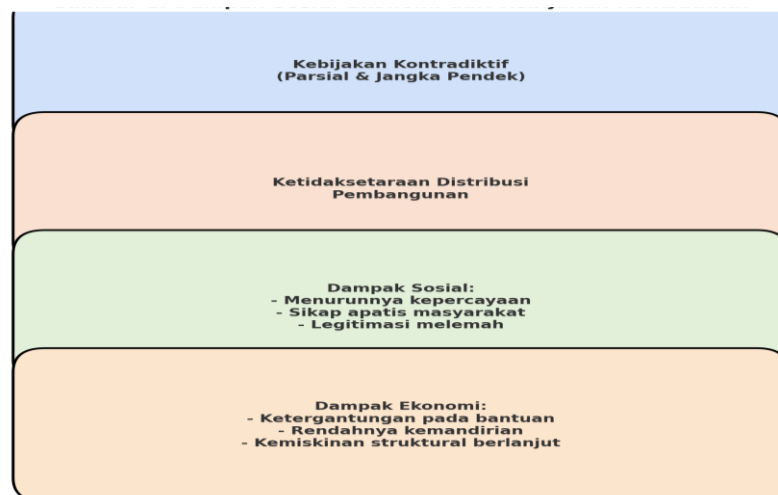
4. Dampak Sosial-Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan

pembangunan yang kontradiktif berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Program pembangunan yang lebih menekankan pada aspek fisik tanpa memperhatikan pemerataan justru memperbesar jurang kesenjangan. Kelompok yang memiliki akses sumber daya mendapat keuntungan lebih besar, sementara masyarakat miskin tetap tertinggal.

Dari sisi sosial, masyarakat mulai menunjukkan sikap apatis terhadap program pembangunan. Aspirasi mereka yang tidak diakomodasi membuat rasa memiliki terhadap kebijakan semakin menurun, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi pemerintah. Dari sisi ekonomi, bantuan sosial bersifat konsumtif sehingga tidak mampu meningkatkan kemandirian. Masyarakat cenderung bergantung pada bantuan tersebut, sementara peluang untuk memperkuat kapasitas produktif tetap terbatas.

Untuk menggambarkan hubungan antara kebijakan kontradiktif dengan dampaknya, dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 2. Dampak Sosial-Ekonomi dari Kebijakan Kontradiktif

Gambar tersebut menjelaskan bahwa kebijakan kontradiktif memicu dua dampak utama: sosial berupa menurunnya kepercayaan masyarakat dan melemahnya legitimasi, serta ekonomi berupa ketergantungan terhadap bantuan dan berlanjutnya kemiskinan struktural. Dengan demikian, kebijakan pembangunan yang tidak seimbang bukan hanya gagal mengatasi kemiskinan, tetapi justru memperkuat lingkaran ketidakberdayaan masyarakat.

4. Alternatif Solusi

Hasil penelitian juga menemukan perlunya perubahan paradigma pembangunan dari *growth oriented* menjadi *people oriented development*. Beberapa solusi yang diidentifikasi antara lain: peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi lokal melalui modernisasi pertanian dan perikanan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, serta penguatan sinergi multipihak antara pemerintah, perguruan tinggi, dan swasta.

Pembahasan

1. Kontradiksi Pembangunan Daerah
Fenomena paradoks pembangunan di Gorontalo sejalan dengan temuan Nurjihadi & Dharmawan (2016) yang menjelaskan bahwa pembangunan yang berfokus pada proyek ekonomi justru melahirkan ketergantungan baru dan lingkaran kemiskinan. MacKinnon et al. (2022) juga menyoroti kegagalan pembangunan di wilayah tertinggal karena tidak relevan dengan kebutuhan lokal. Kondisi ini diperkuat oleh Iammarino, Rodríguez-Pose, & Storper (2022) yang menegaskan adanya *regional development trap* yang memperlebar ketertinggalan wilayah.

2. Dilema Kebijakan Pemerintah terhadap Rantai Kemiskinan

Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan statistik terbukti tidak mampu memutus rantai

kemiskinan multidimensi. Utomo (2023) menegaskan bahwa tanpa kebijakan peningkatan kualitas manusia, masyarakat akan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Program bantuan konsumtif memang membantu sesaat, tetapi justru menciptakan ketergantungan baru sebagaimana dicatat oleh Nurjihadi & Dharmawan (2016). Ketidaksinkronan kebijakan antarlevel pemerintahan sebagaimana dikemukakan Dimas et al. (2024) memperlihatkan kelemahan tata kelola yang memperparah kondisi tersebut. Data dalam Gambar 1 menguatkan analisis bahwa pembangunan infrastruktur yang masif tidak berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Gorontalo.

3. Pola Rekursif Kemiskinan

Analisis hasil penelitian memperlihatkan bahwa pola rekursif kemiskinan tidak hanya muncul karena faktor ekonomi, tetapi juga akibat lemahnya desain kebijakan pembangunan. Aulia & Saputra (2021) menekankan bahwa pola kemiskinan di Indonesia seringkali berulang karena program penanggulangan yang bersifat konsumtif dan tidak berkelanjutan. Dengan kata lain, masyarakat miskin tetap berada dalam kondisi rentan meski menerima bantuan. Kurniawan (2022) menunjukkan dimensi lain dari rekursivitas kemiskinan, yakni perilaku konsumsi yang tidak produktif. Masyarakat lebih banyak mengalokasikan pengeluaran pada kebutuhan sesaat ketimbang membangun kapasitas jangka panjang. Hal ini menciptakan *self-reinforcing cycle* yang membuat produktivitas rendah dan pendapatan stagnan.

Selain itu, Prawoto (2009) menegaskan bahwa strategi pembangunan jangka pendek tidak mampu menyelesaikan akar masalah kemiskinan struktural. Pendekatan yang parsial justru memperkuat kemiskinan lintas generasi, sehingga masyarakat miskin tetap terjebak

dalam lingkaran keterbatasan. Dengan demikian, pembahasan ini mengonfirmasi bahwa pola rekursif kemiskinan di Gorontalo bersifat multidimensional. Ia lahir dari kebijakan yang parsial, perilaku konsumsi tidak produktif, serta absennya strategi pemberdayaan jangka panjang. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan kebijakan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berbasis pemberdayaan agar siklus kemiskinan berulang dapat diputus.

Dampak sosial-ekonomi

Dampak sosial-ekonomi dari kontradiksi kebijakan pembangunan di Gorontalo memperlihatkan bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan rendahnya pendapatan, melainkan bagian dari paradoks pembangunan. Zaini (2015) menunjukkan bahwa daerah dengan kekayaan sumber daya alam sekalipun dapat tetap terjebak dalam kemiskinan apabila distribusi manfaat pembangunan tidak merata. Kondisi ini sejalan dengan temuan di Gorontalo, di mana pembangunan fisik masif tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya yang tinggal di wilayah pedesaan dan pesisir.

Dari sisi sosial, lemahnya pengakomodasian aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan menyebabkan menurunnya rasa memiliki terhadap kebijakan pembangunan. Hal ini menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat. Ketika kebutuhan riil masyarakat tidak diprioritaskan, muncul sikap apatis dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Legitimasi kebijakan melemah karena dianggap tidak berpihak pada kelompok miskin.

Dari sisi ekonomi, kontradiksi kebijakan juga memperkuat lingkaran ketergantungan. Program bantuan yang bersifat konsumtif tidak mendorong kemandirian, melainkan menumbuhkan pola adaptif yang pasif. Setyawati, Avhanti, & Novarianti (2021) menemukan fenomena serupa pada masyarakat nelayan, di mana lingkaran kemiskinan terus berulang akibat rendahnya akses terhadap sumber daya produktif dan

minimnya strategi pemberdayaan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya akibat kurangnya modal ekonomi, tetapi juga hasil dari struktur kebijakan yang tidak mampu menciptakan transformasi.

Dengan demikian, dampak sosial-ekonomi dari kontradiksi kebijakan pembangunan bersifat multidimensi: di satu sisi memperbesar kesenjangan sosial, dan di sisi lain mempertahankan kemiskinan struktural. Situasi ini memperkuat urgensi reorientasi kebijakan menuju pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis pemberdayaan agar masyarakat miskin tidak lagi terjebak dalam lingkaran ketidakberdayaan yang berulang.

Alternatif Solusi

Pembahasan menunjukkan bahwa solusi efektif memutus siklus kemiskinan adalah melalui pembangunan inklusif dan berbasis pemberdayaan. Utomo (2023) menekankan pentingnya investasi pada pendidikan dan kesehatan, sedangkan Lubis (2017) menekankan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pengentasan yang berkelanjutan. Dimas et al. (2024) juga menegaskan efektivitas pembangunan yang berfokus pada ekonomi lokal dibandingkan kebijakan top-down. Dengan penguatan partisipasi masyarakat serta sinergi multipihak sebagaimana disarankan Mulyadi (2016), pembangunan di Gorontalo dapat diarahkan menuju transformasi yang lebih adil dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan daerah masih menghadapi paradoks antara mengejar pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Orientasi kebijakan yang lebih menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur belum mampu memutus rantai kemiskinan sistemik yang mengakar di masyarakat. Hal ini tercermin dari tingginya angka kemiskinan di Gorontalo

yang mencapai 15,2% pada tahun 2023, jauh di atas rata-rata nasional.

Kemiskinan di wilayah penelitian bersifat sistemik, terutama di pesisir yang bergantung pada perikanan tradisional dan di pedesaan dengan produktivitas pertanian rendah. Faktor pendidikan dan kesehatan yang terbatas memperkuat kemiskinan antargenerasi. Kondisi ini semakin diperparah dengan kebijakan pemerintah yang cenderung parsial, tumpang tindih, serta minim partisipasi masyarakat. Akibatnya, program pembangunan sering kali tidak berkelanjutan dan gagal menyentuh akar masalah kemiskinan struktural.

Untuk memutus siklus vicious kemiskinan, solusi yang diperlukan adalah pendekatan pembangunan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi lokal, dan sinergi multipihak menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Tanpa adanya transformasi paradigma kebijakan dari *growth oriented* menuju *people oriented development*, kemiskinan sistemik di Gorontalo berpotensi terus berlanjut lintas generasi.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya reorientasi kebijakan pembangunan daerah yang tidak hanya menekankan aspek fisik, tetapi juga menyoal dimensi sosial dan manusia. Paradoks pembangunan harus diatasi dengan strategi holistik agar kesejahteraan masyarakat benar-benar dapat meningkat dan siklus kemiskinan dapat diputus secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M., Muta'ali, L., & Rijanta, R. (2025). Mapping poverty traps in Indonesia: A spatial perspective. *Regional Statistics*, 15(2), 341-364. <https://doi.org/10.15196/RS150207>
- Aulia, H. H., & Saputra, R. (2021). Memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya. *SALAM: Islamic Economics Journal*, 2(2), 26-40.

UIN Raden Intan Lampung. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/salam/article/view/10856/pdf>

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil kemiskinan di Indonesia September 2023*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- Barrett, C. B., Carter, M. R., & Chavas, J.-P. (Eds.). (2019). *The Economics of Poverty Traps*. University of Chicago Press / NBER.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dimas, E., Pratama, R., & Izharun. (2024). Tantangan dan strategi penanganan kemiskinan struktural dalam mewujudkan pembangunan sosial inklusif. *Journal of Mandalika Social Science*, 2(1), 64-71. Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
- Kurniawan. (2022). Kompleksitas permasalahan kemiskinan dan lingkaran konsumsi tembakau di Indonesia. *Sosio Informa*, 8(1), 1-12. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan.
- Lubis, H. (2017). Mengentaskan kemiskinan: Multidimensional approaches. *Jurnal Sosiologi*, 29(1), 1-12. Universitas Trunojoyo.
- Iammarino, S., Rodríguez-Pose, A., & Storper, M. (2022). The regional development trap in Europe. *Economic Geography* (artikel akses terbuka via LSE/SSRN).
- Mulyadi, M. (2016). Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan dalam masyarakat. *Kajian*, 21(3), 221-236. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (1994/2014). *Qualitative Data Analysis: Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- MacKinnon, D., Kempton, L., O'Brien, P., Ormerod, E., Pike, A., & Tomaney, J. (2022). Reframing urban and regional 'development' for 'left behind' places. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 15(1), 39-56.
- Nurjihadi, M., & Dharmawan, A. H. (2016). Lingkaran setan kemiskinan dalam masyarakat pedesaan: Studi kasus petani tembakau di kawasan pedesaan Pulau Lombok. *Jurnal Sodality*, 4(1), 1-15. Universitas Teknologi Sumbawa.
- Prawoto, N. (2009). Memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9(1), 56-68. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rothenberg, A. D., Wang, Y., Chari, A. V., & Nataraj, S. (2025). When regional policies fail: An evaluation of Indonesia's Integrated Economic Development Zones (KAPET). *Journal of Development Economics*, 176(2), 103503.
- Setyawati, L. R., Avhanti, A. S., & Novarianti, A. D. (2021). Analisa faktor pendukung vicious circle of poverty di masyarakat nelayan. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1), 1-12. Universitas Pertahanan RI
- Utomo, Y. T. (2023). Breaking the vicious cycle of poverty. *Islamic Economic, Accounting, and Management Journal (Tsarwatica)*, 5(1), 1-6. STEI Hamfara Yogyakarta. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/tsarwatica>
- Zaini, A. (2015). Kemiskinan di daerah kaya sumber daya alam: Sebuah paradoks pembangunan. *Jurnal Borneo Administrator*, 11(2), 115-132. Lembaga Administrasi Negara. <https://core.ac.uk/display/297928500>